

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 24/ITJ.2/TU.210/I/2025

Yth : Inspektur Jenderal KKP
Dari : Inspektur II
Hal : Laporan Kinerja Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 20 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2024 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada mitra kerja Inspektorat II, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lutfi

LAPORAN KINERJA

2024

INSPEKTORAT II

**Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat II dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun dari hasil pengukuran kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat II dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat II dan Inspektorat Jenderal KKP.

Jakarta, 20 Januari 2024
Inspektur II



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ir. Lutfi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat II menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Tidak hanya itu, Inspektorat II juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Inspektorat II harus memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat II tahun 2024 adalah "Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan". Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 3 Sasaran Strategis dengan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 13 IKU tersebut, sebanyak 11 capaian IKU melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pencapaian atas 3 IKU lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan kondisi capaian ini, nilai kinerja organisasi Itjen yang ditunjukkan dengan Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai 107,73%.

Beberapa capaian kinerja Inspektorat II yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain: a) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II sebesar 0,05% dari total realisasi anggaran mitra, naik jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 0,10%; b) Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II mendapat Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,68, naik jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu senilai 3,56; c) Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK Tahun 2024 bertambah menjadi 3 unit menjadi 32 unit dari sebelumnya 29 Unit pada Tahun 2023; dan d) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II berpredikat A dengan nilai 88,36, naik jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu berpredikat A dengan nilai 82,64.

Pencapaian kinerja program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp6.230.790.211,- atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp6.230.797.000,.

Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 107,73%). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 7,74%. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Inspektorat II sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas pengawasan. Selain itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EXECUTIVE	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
E. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2024.....	4
BAB II. PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024.....	6
1. Visi Inspektorat Jenderal KKP	6
2. Misi Inspektorat Jenderal KKP	6
3. Tujuan	7
4. Sasaran Strategis	7
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2024	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN	31
1. Realisasi Anggaran Kegiatan.....	31
2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja	31
3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi).....	32
BAB IV. PENUTUP.....	33
A. KESIMPULAN	33
B. PERMASALAHAN.....	33
C. SARAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II	4
Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat II	8
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024	10
Tabel 4. Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2024	12
Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2020-2023	13
Tabel 6. Perbandingan Tingkat Maturitas Mitra Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	14
Tabel 7. Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat WBK	15
Tabel 8. Perbandingan Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Inspektorat II Tahun 2020-2024	16
Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Tahun 2024	17
Tabel 10. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II Tahun 2020-2024	17
Tabel 11. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2024	19
Tabel 12. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020-2024	20
Tabel 13. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN	21
Tabel 14. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020- 2024	21
Tabel 15. Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2024	22
Tabel 16. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020-2024	23
Tabel 17. Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2024	24
Tabel 18. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020-2024	24
Tabel 19. Perbandingan Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (rekomendasi) Tahun 2020-2024	26
Tabel 20. Perbandingan Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	27

Tabel 21. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II Tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	28
Tabel 22. Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II Tahun 2020- 2024	29
Tabel 23. Perbandingan Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II Tahun 2020-2024	30
Tabel 24. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja	32

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dari Nawa Cita yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya terdapat dua agenda yang terkait langsung dengan peran Inspektorat Jenderal. Agenda tersebut adalah terkait “Perbaikan tata kelola pemerintahan” (agenda kedua) dan terkait “Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi” (agenda kelima).

Pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi isu penting dan pemerintah secara terus menerus telah melakukan perubahan sistem dan kebijakan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Kedua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga strategis karena dampak negative dari korupsi akan juga berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hal tersebut belum optimal. Masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting. Diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan dua dari lima agenda pembangunan nasional, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan serta pemberantasan korupsi melalui akuntabilitas kinerja organisasi.

B. DASAR HUKUM

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

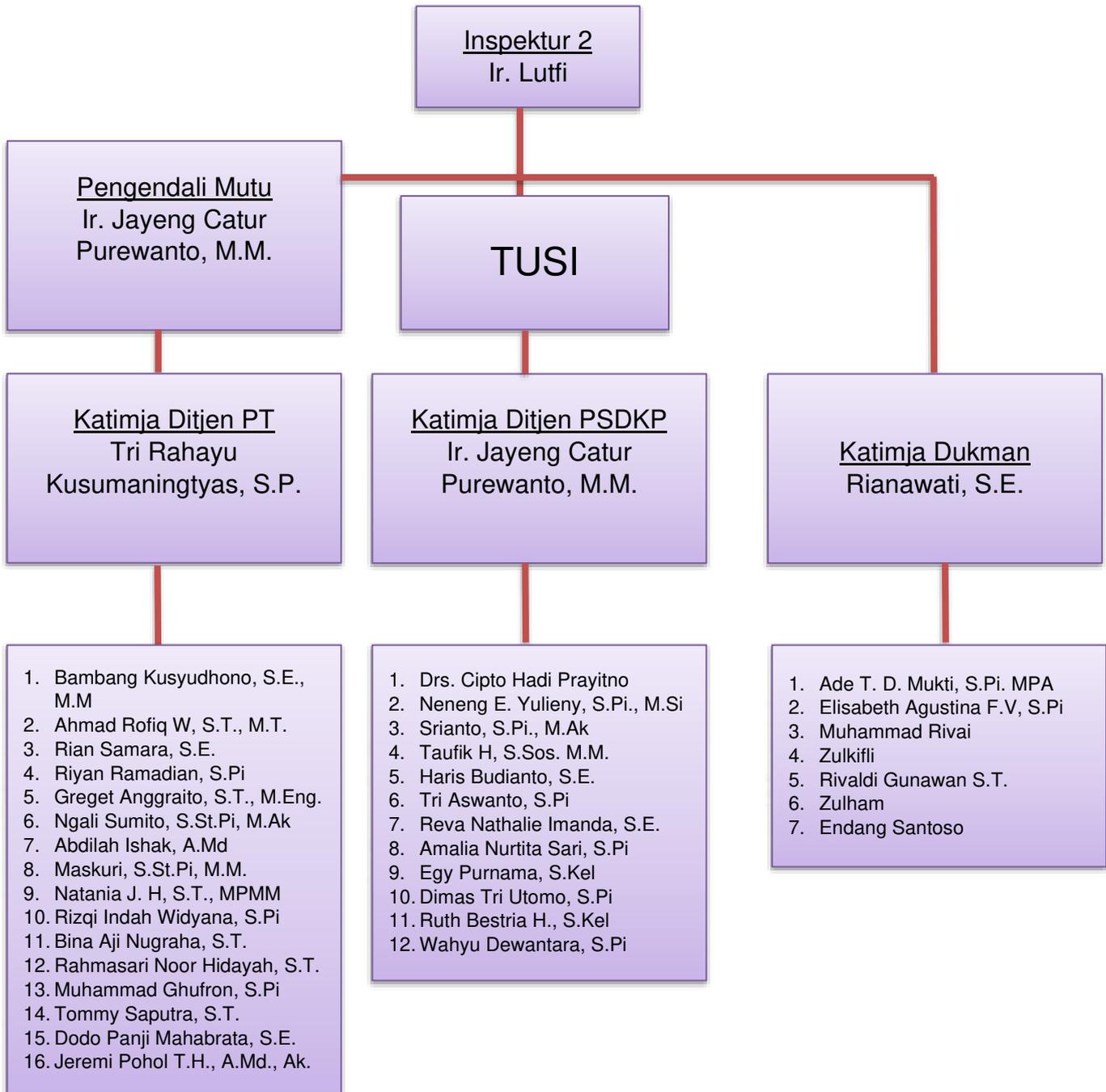
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- b. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- d. Koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- e. Pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat II.

D. STRUKTUR ORGANISASI



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat II pada Tahun 2024 sebanyak 41 orang dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 1. di bawah ini

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur II	1 Orang
2.	Auditor Utama	1 Orang
3.	Auditor Madya	6 Orang
4.	Auditor Muda	8 Orang
5.	Auditor Pertama	15 Orang
6.	Auditor Penyelia	1 Orang
7.	Auditor Terampil	1 Orang
8.	APKAPBN Muda	1 Orang
9.	APKAPBN Pertama	1 Orang
10.	Perencana Muda	1 Orang
11.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 Orang
12.	Pengelola Surat	1 Orang
13.	Staff Pelaksana	1 Orang
14.	Driver	2 Orang
Total		41 Orang

E. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2024

Isu strategis atau fokus pengawasan Tahun 2024 yang diemban oleh Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:
 - a. Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SKPT
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
 - c. Pemantauan Pelaksaaan Kampung Nelayan Maju
 - d. Audit Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik
 - e. Evaluasi Pengelolaan PHLN : GEF 6
 - f. Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- g. Evaluasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun 2023
 - h. Evaluasi Pengembangan Korporasi Nelayan
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP:
 - a. Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan
 - b. Evaluasi Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - c. Evaluasi Kegiatan Pengawasan Pengelolaan SDK dan SDP
 - d. Pemantauan Pembangunan Pos Jaga
 3. Pengawasan Kinerja Manajerial pada Mitra Inspektorat II
 - a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
 - b. Pelayanan Publik
 - c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - d. Penanganan Benturan Kepentingan
 4. Pengawasan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Mitra Inspektorat II
 5. Pemantauan Tindak Lanjut pada Mitra Inspektorat II
 6. Pengawasan Tematik/Mandatory pada Mitra Inspektorat II
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
 - b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PA dan PBJ)
 - c. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (LK dan BMN)
 - d. Laporan Kinerja (LKj)
 - e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - f. Manajemen Risiko (MR)
 - g. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)

BAB II

PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

Rencana Strategis Itjen KKP mengalami beberapa perubahan disesuaikan dinamika organisasi. Perubahan terakhir, terkait penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP. Adapun visi-misi Itjen Renstra 2020 – 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi Inspektorat Jenderal KKP

Didasarkan pada visi KKP tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan visi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini dapat diartikan bahwa KKP mendukung penuh Visi Presiden khususnya dalam hal pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dukungan KKP dalam bentuk visi tersebut juga menjadi acuan bagi Itjen KKP dalam menentukan arah pengawasan internal selama kurun 5 (lima) tahun pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Sebagai unsur pengawas intern di lingkungan KKP, visi Itjen KKP juga disusun untuk mendukung Visi Presiden secara umum dan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Oleh karena itu dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2020-2024 adalah

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”.

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dan *clean government*.

2. Misi Inspektorat Jenderal KKP

Dari 4 (empat) misi Presiden yang dijalankan oleh KKP yaitu misi ke-1 “peningkatan kualitas manusia Indonesia”; misi ke-2 “struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan

berdaya saing”; misi ke-4 “mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”; dan misi ke-8“ pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, Itjen KKP melaksanakan 1 (satu) misi terkait dengan misi ke-8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Mengacu pada tugas, fungsi dan peran Itjen KKP serta misi Presiden ke-8 yang dijalankan oleh KKP, terdapat 3 (tiga) misi Itjen KKP tahun 2020-2024, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP;**
- 2. Mendorong pengendalian intern yang efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP; dan**
- 3. Mendorong terwujudnya sumber daya aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.**

3. Tujuan

Dalam menjabarkan visi dan misi Itjen KKP tahun 2020-2024, maka tujuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Terwujudnya kinerja KKP yang efektif dan efisien;
- b. Terciptanya suatu sistem dan tata kelola KKP yang baik; dan
- c. Terwujudnya budaya integritas di lingkungan KKP.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan suatu ukuran pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun sasaran strategis Inspektorat II pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah lingkup mitra Inspektorat II.
- b. Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan efektif lingkup Inspektorat II.
- c. Dukungan manajemen pengawasan yang akuntabel lingkup Inspektorat II.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2024, Inspektorat II melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.103.148.000,- dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sebanyak 3 Laporan dan Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.127.649.000,- dengan output 1 Laporan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.103.148.000,- terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.722.493.000,-;
 - b. Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp969.653.000,-;
 - c. Dukungan Operasional Pengawasan pada Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.002.000,-;
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.127.649.000,-.

C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2024

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah lingkup mitra Inspektorat II	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 0,05%
		2	Tingkat Maturitas SPIP KKP	3,3 (Nilai)
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat II berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	31 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II	84,00 (A)
2	Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan efektif lingkup lingkup Inspektorat II	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	82%
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan terhadap Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II	82%
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II	82%
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	80%

		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II	4 Dokumen
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II	89%
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II	80%
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat II	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II	100%
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan SEcara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat III	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat II untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di kinerjaku.kkp.go.id.

Pada Tahun 2024, Sasaran kinerja Inspektorat II terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) yang diukur keberhasilan pencapaiannya melalui capaian 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini dapat dilihat sebagaimana Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
1	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah lingkup mitra Inspektorat II	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 0,50%	0,09%	120%	Capaian melebihi target
		2	Tingkat Maturitas SPIP KKP	3,30 (Nilai)	3,68	111,52%	Capaian melebihi target
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat II berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	31 Unit	32 Unit	103,23%	Capaian melebihi target

		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II	84,00 (A)	88,36 (A)	105,19%	Capaian melebihi target
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	82%	87,43%	106,62%	Capaian melebihi target
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II	82%	99,00%	120%	Capaian melebihi target
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II	82%	94,51%	115,26%	Capaian melebihi target
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II	80%	92,35%	115,44%	Capaian melebihi target
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Capaian sesuai target
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II	89%	95,97%	98,33%	Capaian melebihi target
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II	80%	100%	120%	Capaian melebihi target
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat II	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan SEcara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	Capaian sesuai target

Analisis atas capaian kinerja terhadap IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

SS-1: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah lingkup mitra Inspektorat II

SS ke-1 “Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah lingkup mitra Inspektorat II” pada Level II didukung oleh 4 (empat) IKU yaitu

1. IKU-1 “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II”
2. IKU-2 “Tingkat Maturitas SPIP KKP (Level)”
3. IKU-3 “Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)”
4. IKU-4 “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II”.

Pada Tahun 2024, dilakukan pengukuran terhadap keempat IKU tersebut dengan gambaran sebagai berikut:

IKU 1 : Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II

IKU ini menggambarkan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2024. Pengukuran IKU ini dengan menggunakan Polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 0,09%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4. Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2024

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Ditjen Perikanan Tangkap	842.679.861.445	568.110.399	$\leq 0,5$	0,07%	120
2	Ditjen PSDKP	1.119.216.743.475	1.118.316.959	$\leq 0,5$	0,10%	120
TOTAL		1.961.896.604.920	1.686.427.358	$\leq 0,5$	0,09%	120

Adapun keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat II antara lain Probitas Audit, Audit Kinerja, Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Reviu Penganggaran, Reviu LK, Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, Pengawasan Penyerapan Anggaran, Pengawasan Pengelolaan BMN, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, PTL hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan Tematik Lainnya (Kegiatan Prioritas, PNBPN, dll)

Jika dibandingkan dengan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2023, IKU capaian nilai temuan materialitas KKP Tahun 2023 tidak mengalami perubahan (capaian melebihi target). Selanjutnya jika dibandingkan selama 5 tahun (Tahun 2020-2024), IKU capaian nilai temuan materialitas KKP cenderung stabil dan juga selalu melebihi target tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kinerja yang baik dari Inspektorat II dalam mendampingi Mitra dalam penyelesaian setiap temuan eksternal KKP, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5. di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2020- 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektora t II	≤1	0,25	≤1	0,01	≤1	0,01	≤1	0,09	≤0,05	0,09

Keterangan:

R = Realisasi

T = Target

IKU-2 :Tingkat Maturitas SPIP KKP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat Maturitas SPI mitra kerja diperoleh dari hasil evaluasi BPKP. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023/2024 yang dilakukan oleh BPKP dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,683”.

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada Level 3 (terdefinisi).

Jika dibandingkan dengan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2023, IKU tingkat maturitas SPIP KKP mengalami kenaikan dari sebelumnya 3,56 menjadi 3,68. Selanjutnya jika dibandingkan selama 5 tahun (Tahun 2020-2024), IKU tingkat maturitas SPIP KKP

cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2020 s.d. 2023, namun IKU ini selalu melebihi target yang ditetapkan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena belum memadainya Kebijakan Manajemen Risiko KKP terutama pada kualitas identifikasi risiko dan identitas risiko. Tindakan pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja belum sepenuhnya diimplementasikan dan belum sepenuhnya dapat meminimalisasi seluruh risiko operasional unit kerja. Target dan realisasi maturitas SPIP tahun 2020 - 2024 diuraikan pada Tabel 6. di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Tingkat Maturitas Mitra Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Maturitas SPIP KKP	3	4,14	3,6	3,87	3	3,81	3,1	3,56	3,3	3,68

Keterangan:

R = Realisasi

T = Target

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan ke tingkat optimum, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan organisasi, melakukan identifikasi dan analisis probabilitas praktik korupsi pada kegiatan utama organisasi, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko, serta mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja eselon I dan kementerian.

**IKU-3 :Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK
(jumlah akumulasi)**

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. WBK adalah sebutan atau predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat memperoleh hasil penilaian indikator proses dan indikator hasil ≥ 75 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK pada tahun 2024 diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V). Capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK Tahun 2024 pada unit Eselon I dibuktikan dengan SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP sesuai pedoman yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Inspektorat Jenderal KKP.

Jumlah Unit Kerja Mitra Inspektorat II yang berpredikat menuju WBK secara akumulatif sebanyak 32 satker dari target sebanyak 31 satker, sehingga capaian IKU ini adalah 103,23% atau terdapat penambahan sebanyak 3 satker pada Tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7. dibawah ini.

Tabel 7. Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat WBK

Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat WBK		
	Ditjen Perikanan Tangkap	
1	Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan/Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan	WBK TPN 2016
2	PPN Pemangkat	WBK TPN 2015
3	BBPI Semarang	WBK MKP 2017
4	PPN Sibolga	WBK MKP 2017
5	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	WBK MKP 2019
6	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	WBK MKP 2019
7	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	WBK MKP 2019
8	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WBK MKP 2020
9	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan	WBK MKP 2020
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	WBK MKP 2020
11	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	WBK MKP 2021
12	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	WBK MKP 2021
13	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu	WBK MKP 2022
14	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	WBK MKP 2023
15	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	WBK MKP 2023
16	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	WBK MKP 2024
17	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	WBK MKP 2023
	Ditjen PSDKP	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	WBK MKP 2018
2	Pangkalan PSDKP Benoa	WBK MKP 2019
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	WBK MKP 2019
4	Pangkalan PSDKP Tual	WBK MKP 2020
5	Pangkalan PSDKP Batam	WBK MKP 2020

6	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	WBK MKP 2021
7	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	WBK MKP 2021
8	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	WBK MKP 2021
9	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	WBK MKP 2021
10	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	WBK MKP 2022
11	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	WBK MKP 2022
12	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	WBK MKP 2022
13	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	WBK MKP 2023
14	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	WBK MKP 2023
15	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	WBK MKP 2024

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2023, IKU capaian Unit Kerja berpredikat menuju WBK Mitra Inspektorat II tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,18%, yaitu dari 107,41% menjadi 103,23% dari sisi persentase, hal tersebut dikarenakan berkurangnya penambahan unit kerja yang berpredikat WBK pada tahun 2024 (3 unit kerja) dibandingkan dengan Tahun 2023 (4 unit kerja) yang mendapat predikat WBK.

Adapun jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, penambahan unit kerja berpredikat WBK selalu stabil dan target 31 unit kerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 telah terlampaui, yaitu sebanyak 32 unit kerja berpredikat WBK. Hal tersebut dilihat pada Tabel 8. di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Inspektorat II Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Inspektorat II	12	15	17	21	23	25	27	29	31	32

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Untuk terus meningkatkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Mitra Inspektorat II, langkah yang dilaksanakan antara lain kegiatan asistensi, dan pemantauan pada satker lingkup mitra Inspektorat II.

IKU-4 :Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II

Nilai penilaian mandiri SAKIP merupakan ukuran atas tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP. Nilai Sistem Akntabilitas Kinerja KKP diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil Penilaian Mandiri Mitra Inspektorat II (Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP) adalah sebesar 88,36 (A) dari Target 84 (A). Sehingga, capaian target Mitra Inspektorat II telah terpenuhi. Hasil penilaian mandiri evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada mitra Inspektorat II dirinci pada Tabel 9. dinnawah ini.

Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Hasil Evaluasi	Target
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	88,18 (A)	84 (A)
2.	Ditjen PSDKP	88,56 (A)	84 (A)
Rata-Rata Capaian		88,36 (A)	84 (A)

Jika dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 5,72 poin atau 6,92%. Dan jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, pada tahun 2022 IKU Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya pergantian IKU pada Mitra Inspektorat II yang mengakibatkan penilaian pada komponen Perencanaan Kinerja mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2024 pencapaian IKU ini telah melebihi target. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 10. di bawan ini.

**Tabel 10. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II
Tahun 2020- 2024**

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II	81	87,03	83	87,04	80,01	80,97	80,5	82,64	84	88,36

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian IKU tersebut antara lain Reviu Laporan Kinerja, Asistensi SAKIP dan Evaluasi Implementasi SAKIP.

SS-2: Pengawasan Intern yang Handal Pada Mitra Inspektorat II

SS ke-2 “Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II” pada Level II didukung oleh 7 (tujuh) IKU yaitu

1. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II
2. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II
3. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II
4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II
5. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II
6. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II
7. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II

Pada Tahun 2024, dilakukan pengukuran terhadap ketujuh IKU tersebut dengan gambaran sebagai berikut,

IKU-5 : Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II

Suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan program prioritas/strategis mitra kerja. Kegiatan mitra/unit eselon I dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria

sebagai berikut: 1. memiliki dampak langsung kepada masyarakat; 2. memiliki anggaran besar; 3. mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP; 4. mendukung pencapaian prioritas nasional; 5. merupakan arahan direktif presiden; dan 6. pertimbangan lainnya yang relevan.

Pada Mitra Inspektorat II, yang dilaksanakan Pengukuran Tingkat Efektifitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis yaitu pada Ditjen Perikanan Tangkap, sedangkan pada Ditjen PSDKP tidak terdapat kegiatan Prioritas/Strategis.

Pengukuran IKU dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 dengan capaian nilai sebesar 87,43% dari target sebesar 82%. Tingkat efektifitas pengawasan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah diukur dengan menggabungkan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dengan hasil Capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ lingkup KKP Tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut dicantumkan pada Tabel 11. di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2024

Unit Kerja Eselon I	Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Efektifitas Pengawasan PBJ	Efektifitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah
DJPT	90,80	84,06	87,43

Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 88,84% dari target 81%, capaian Tahun 2024 menunjukkan kenaikan dan melebihi target. Adapun jika dibandingkan pencapaian dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, pencapaian target ini selalu berubah dan tidak menunjukkan adanya tren kenaikan atau penurunan. Hal ini disebabkan objek evaluasi yaitu kelompok nelayan penerima bantuan pemerintah yang selalu berbeda-beda tiap tahunnya, sehingga pemanfaatan bantuan pemerintah oleh kelompok nelayan tersebut hasil evaluasinya juga berbeda. Secara lengkap hasil tingkat efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dicantumkan pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat II	70	92,55	72,5	89,43	80	95,72	81	88,84	82	87,43

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2024 yang dilakukan secara terpadu oleh masing-masing Inspektorat.

IKU-6 : Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II

Suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat. Pada tahun 2024, Tingkat Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 82%. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen KKP pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pengukuran IKU dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 dengan capaian nilai sebagai berikut,

Tabel 13. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN

No.	Unit Kerja	Nilai (%)					
		Indikator 1*)	Indikator 2**)	Indikator 3***)	Total	IKU	Target 2024
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	20,00	40,00	38,00	98,00	99,00	81,00
2.	Ditjen PSDKP	20,00	40,00	40,00	100,00		

Keterangan :

* = Kualitas Perencanaan Pengawasan

** = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

*** = Nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2023, IKU capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,25%, yaitu dari 90,75% menjadi 99%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pada mitra Inspektorat II.

Adapun jika dibandingkan pencapaian dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, nilai pencapaian target dari IKU ini menunjukkan adanya tren kenaikan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BMN oleh mitra Inspektorat II berjalan semakin efektif tiap tahunnya. Secara lengkap hasil tingkat efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat II Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 14. di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020- 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat II	70	85,5	72,5	83	80	87,5	81	90,75	82	99

Keterangan:

R = Realisasi

T = Target

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 7 ini antara lain Reviu Rencana Kebutuhan BMN, Reviu Usulan Perubahan RKBMN, Pemantauan Pengelolaan BMN dan Evaluasi Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada mitra Inspektorat II.

**IKU-7 : Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
Lingkup Mitra Inspektorat II**

Suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP. Pengukuran IKU dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 dengan target sebesar 82%. Hasil Pengukuran IKU Efektivitas Pengawasan PBJ Mitra Inspektorat II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 15. di bawah ini.

**Tabel 15. Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat II
Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai (%)					
		Indikator 1*)	Indikator 2**)	Indikator 3***)	Total	IKU	Target 2024
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	20,00	40,00	38,02	98,02	94,51	81
2.	Ditjen PSDKP	18,35	40,00	32,64	90,99		

Keterangan :

* = Kualitas Perencanaan Pengawasan

** = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

*** = Nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2023, IKU capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,62%, yaitu dari 88,89% menjadi 94,51%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pada mitra Inspektorat II.

Adapun jika dibandingkan pencapaian IKU capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, nilai pencapaian target dari IKU ini menunjukkan adanya tren kenaikan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh mitra Inspektorat II berjalan semakin efektif dan transparan setiap tahunnya. Secara lengkap hasil tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan Barang/Jasa lingkup mitra Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 16. di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020- 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat II	70	81,30	72,5	86,85	80	87,64	81	88,89	82	94,51

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 8 ini antara lain Penilaian Efektifitas Pengelolaan PBJ Tahun 2024.

IKU-8 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II

IKU ini menggambarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) ditargetkan sebanyak 80% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat II mencapai 92,35%, dari target sebesar 80% sehingga persentase capaian IKU terhadap target adalah 115,44%. Rincian capaian IKU ini diuraikan pada Tabel 17. di bawah ini.

Tabel 17. Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% (Tuntas)	Sisa Rekomendasi	% (sisa Rekomendasi)
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	640	542	84,69	98	15,31
2.	Ditjen PSDKP	126	126	100	0	0
	Total	766	668	92,35	98	7,65

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2023, IKU capaian Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 5,54%, yaitu dari 86,81% menjadi 92,35%. Selanjutnya jika dibandingkan pencapaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, nilai pencapaian target dari IKU ini menunjukkan kecenderungan adanya tren kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Mitra Inspektorat II (DJPT dan DJPSDKP) menindaklanjuti temuan dengan cukup baik dan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Inspektorat II telah dilakukan secara intensif. Secara lengkap hasil capaian IKU ini dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	60	76,55	65	87,28	70	91,78	75	86,81	80	92,35

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat II untuk mendukung capaian IKU tersebut yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan Layanan Tindak Lanjut Online melalui Aplikasi SIDAK.

IKU-9 : Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (rekomendasi)

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi.

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang diberikan kepada mitra kerja sesuai dengan target masing-masing Inspektorat pada perjanjian kinerja. Pada Tahun 2024, target Inspektorat II adalah 4 rekomendasi kebijakan.

Cara pengukurannya adalah melihat jumlah kajian/rekomendasi yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat terhadap peraturan/kebijakan/sistem/prosedur operasional mitra kerja atau unit kerja lainnya yang dilaksanakan dan disampaikan pada Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sampai dengan Triwulan IV, capaian jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang sudah dicapai sebanyak 4 (empat) rekomendasi, yang berarti telah mencapai target 100%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2023, IKU capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II tahun 2024 tidak ada kenaikan jumlah rekomendasi, yaitu sejumlah 4 dokumen. Adapun jika dibandingkan pencapaian IKU ini sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024 pencapaiannya selalu mencapai target dan tidak fluktuatif. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 19. di bawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	4 dok	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok				

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Adapun 4 (empat) rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat II selama Tahun 2024 yaitu

1. Telaahan dan Masukan atas Perhitungan Total Nilai Investasi Terkait Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
2. Telaahan dan Masukan atas Standar Operasional Prosedur Penerbitan Standar Laik Operasi
3. Hasil Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan Stasiun PSDKP Biak
4. Masukan terhadap Perbaikan Pelaksanaan Pasca Produksi Tahun 2024

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU 9 ini adalah pengawasan (reviu)/kajian terhadap peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur administrasi/operasi lingkup mitra kerja Inspektorat II.

IKU-10 : Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II

IKU ini menggambarkan jumlah penugasan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada mitra kerja yang memenuhi standar penilaian sesuai Pedoman Evaluasi Kendali Mutu Inspektorat Jenderal.

Jumlah pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang memenuhi standar mutu pengawasan pada Inspektorat II dengan target minimal 89% dari jumlah kegiatan pengawasan (audit dan evaluasi) yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

Pengukuran dilaksanakan dengan menilai pelaksanaan pengawasan (audit dan evaluasi) yang telah dilakukan penilaian berjenjang dan pelaporan hasil pengawasan (audit dan evaluasi) yang telah sesuai dengan standard di lingkup KKP.

Pada Semester I Tahun 2024, Inspektorat V selaku Tim Evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan telah melaksanakan Evaluasi terhadap Inspektorat II dengan perolehan nilai Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II sebesar 96,65% dari target 89%, sedangkan pada Semester II Tahun 2023, hasil Evaluasi terhadap Inspektorat II memperoleh nilai sebesar 100% dari target 89%. Hasil Penilaian secara Tahunan yaitu adalah sebesar 98,33% yang berarti telah melebihi target 89%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2023, IKU capaian Presentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Inspektorat II tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,6%, yaitu dari 95,97% menjadi 98,33%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan auditor terhadap pembuatan kendali mutu laporan melalui aplikasi Simwas. Selanjutnya jika dibandingkan pencapaian IKU ini sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, nilai pencapaiannya cenderung mengalami kenaikan dan selalu melebihi target. Secara lengkap hasil perbandingan ini dicantumkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Perbandingan Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang memenuhi Standard Mutu Pengawasan Inspektorat II	85	91,94	86	90,37	87	99,57	88	95,97	89	98,33

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target IKU 10 adalah supervisi berjenjang pada setiap pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi Standar Mutu setiap semester yang

dikoordinasikan oleh Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

**IKU-11 : Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT
Lingkup Inspektorat II**

Merupakan jumlah pelaksanaan penugasan pengawasan lingkup Inspektorat yang mengacu kepada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Jumlah pelaksanaan pengawasan lingkup Inspektorat yang sesuai dengan PKPT Tahun 2024 dengan target kesesuaian sebesar 80%.

Pada Semester I Tahun 2024, Inspektorat V selaku Tim Evaluasi Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT telah melaksanakan Evaluasi terhadap Inspektorat II dengan perolehan nilai Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II sebesar 100% dari target sebesar 80%, sedangkan pada Semester II Tahun 2024, Hasil Evaluasi terhadap Inspektorat II memperoleh nilai sebesar 100% dari target 80%. Hasil Penilaian secara Tahunan yaitu adalah sebesar 100% yang berarti telah melebihi target 80%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2023, IKU capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,78%, yaitu dari 98,22% menjadi 100% yang dapat dilihat pada tabel 19 berikut. Hal ini disebabkan adanya upaya peningkatan kepatuhan dari Inspektorat II terhadap pelaksanaan PKPT Tahun 2024 dan monitoring internal Inspektorat II secara berkala terhadap pelaksanaan PKPT Inspektorat II. Adapun jika dibandingkan pencapaian IKU ini dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, nilai pencapaiannya cenderung fluktuatif dan selalu melebihi target. Secara lengkap hasil perbandingan ini dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Inspektorat II	80	87,69	80	85,96	80	100	80	98,22	80	100

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Tingkat kepatuhan PKPT lingkup Inspektorat II dari tahun ke tahun yang fluktuatif dikarenakan capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, Direktif Menteri, pemotongan anggaran serta realisasi capaian kegiatan mitra.

IKU-12 : Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II

IKU ini menggambarkan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran, dan pengelolaan di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Dari target 100%, diperoleh capaian sebesar 100%, yang diperoleh dari persentase ROK bulanan yang disampaikan ke Bagian Keuangan dan Umum yang tepat waktu, pengisian aplikasi triwulanan dan tersedianya laporan kinerja Interim Triwulanan semuanya sebesar 100%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2023, pencapaiannya tidak ada perubahan dan selalu mencapai target yaitu 100%. Selanjutnya jika pencapaian IKU ini dibandingkan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pencapaiannya juga stabil dan selalu mencapai target yang dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II Tahun 2020 - Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

**IKU-13 : Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel
Lingkup Inspektorat II**

IKU ini menggambarkan pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat. Terselenggaranya pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat secara tertib dan akuntabel yang ditunjukkan dengan tersedianya Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu.

Pengukuran IKU dilakukan dengan melakukan penilaian atas Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran (A): Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan yang disampaikan kepada Bagian Keuangan selambatnya pada minggu pertama bulan berjalan (bobot 100%) Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran (B): Laporan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Anggaran bulanan yang disusun selambatnya pada minggu ke dua bulan selanjutnya setelah pelaksanaan anggaran. Capaian IKU ini dapat diukur dari rata-rata realisasi A dan B.

Pada Tahun 2024, IKU ini diperoleh capaian sebesar 100%, yang dihasilkan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran yang disampaikan tepat waktu.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2023, pencapaiannya tidak ada perubahan dan selalu mencapai target yaitu 100%. Selanjutnya jika pencapaian IKU ini dibandingkan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pencapaiannya juga stabil dan selalu mencapai target yang dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Perbandingan Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat II	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Inspektorat II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.230.797.000,- untuk menghasilkan 1 (satu) output yaitu Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sebanyak 2 laporan. Untuk mencapai output tersebut dibagi menjadi 3 kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern Mitra Inspektorat II dengan anggaran Rp3.692.146.000,-.
Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp3.692.145.000,- .
2. Dukungan Operasional Pengawasan pada Mitra Inspektorat II dengan anggaran Rp411.002.000,-.
Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp410.999.876,- .
3. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II dengan anggaran Rp2.127.649.000,-.
Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp2.127.645.625,- .
Sehingga total realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.230.790.211,- atau 99,99% dari pagu sebesar Rp6.230.797.000,-.

2. Realisasi Anggaran masing- masing Sasaran Kinerja

Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran operasional Inspektorat II dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya Sasaran Strategis dan tujuan. Namun, perlu disampaikan bahwa pola rancangan anggaran Inspektorat II dalam mencapai target indikator kinerja memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan unit eselon I lainnya. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat II memiliki ruang lingkup yang meliputi pengawasan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntabilitas manajemen kinerja, reformasi birokrasi, dan tema lainnya. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja (strategis) Itjen tahun 2024 disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Realisasi Anggaran masing- masing Sasaran Kinerja

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1. Tata Kelola pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat II 2. Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II	Pengawasan Intern Mitra Inspektorat II	4.103.148.000	4.103.144.586	99,99
	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II	2.127.649.000	2.127.645.625	99,99
TOTAL		6.230.797.000	6.230.790.211	99,99

3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi)

Pengukuran kinerja **value for money** pada organisasi sektor publik dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam **value for money** berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Inspektorat II tahun 2024 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi.

Efisiensi Capaian Kinerja *Output* berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp6.230.790.211,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,01% dalam menghasilkan *output*.

Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi bila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2024, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat II digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil 0,01% dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 107,73%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (NPSS) sebesar 7,73%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kegiatan yang mendukung kinerja Itjen KKP tahun 2024 antara lain:

1. Pengukuran kinerja Inspektorat II periode Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id menunjukkan capaian kinerja Itjen KKP Tahun 2024 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 107,73% dan secara umum capaian kinerja Inspektorat II di atas target, sehingga perlu dipertahankan atau ditingkatkan.
2. Pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Tahun 2024 sebanyak 13 IKU seluruhnya mencapai target, dengan 10 IKU yang melebihi target 100% dan 3 IKU yang mencapai target 100%.
3. Beberapa capaian kinerja Inspektorat II yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain:
 - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II sebesar 0,09% dari total realisasi anggaran mitra.
 - b. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II mendapat Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,68.
 - c. Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK bertambah menjadi 32 Unit.
 - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II berpredikat A (88,36%).
4. Total realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.230.790.211,- atau 99,99% dari pagu sebesar Rp6.230.797.000,-. Dari total realisasi anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat II cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang tersedia dapat menghasikan capaian melebihi dari target.

B. PERMASALAHAN

Pada dasarnya seluruh target Indikator Kinerja pada Tahun 2024 telah terpenuhi dan melebihi target, namun terdapat catatan yang harus diperhatikan, yaitu dalam hal pelaporan hasil pengawasan yang belum seluruhnya tepat waktu dan diunggah ke situs ams.kkp.go.id.

C. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan juga untuk mengoptimal capaian IKU Inspektorat II, telah dilakukan arahan kepada para auditor dan staff untuk melakukan percepatan penyelesaian laporan hasil penugasan yang selanjutnya diunggah ke ams.kkp.go.id sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dan terciptanya tertib administrasi.